

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan luar negeri adalah kumpulan keputusan, strategi, dan tindakan yang diambil oleh suatu negara untuk mengatur hubungannya dengan negara lain dan aktor internasional.¹ Kebijakan luar negeri mengacu pada strategi dan keputusan suatu negara dalam berurusan dengan negara lain, mencakup diplomasi, perdagangan, tindakan militer, aliansi, dan perjanjian internasional untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara. Kesetaraan gender adalah prinsip fundamental dalam hubungan internasional, yang disatukan sebagai hak asasi manusia universal, dan didukung oleh sejumlah kerangka hukum, seperti Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) tahun 1979, dan Beijing Declaration and Platform for Action 1995, yang mengharuskan negara-negara untuk menerapkan kebijakan untuk mencapai kesetaraan.²

Konsep kepentingan nasional memiliki makna serapan yang dapat ditafsirkan atau diinterpretasikan dalam berbagai cara yang konsisten, tergantung pada tradisi politik dan kerangka budaya yang digunakan oleh suatu negara untuk mengembangkan kebijakan luar negerinya. Konsep kepentingan nasional terdiri dari dua komponen: satu yang secara logis

¹ Alden, Chris, and Amnon Aran, "Foreign Policy Analysis: New Approaches", Routledge, 2016.

² Jamille Bigio and Rachel Vogelstein, "Understanding Gender Equality in Foreign Policy What the United States Can Do", June 2020, <https://cdn.cfr.org/sites/default/files/pdf/Understanding%20Gender%20Equality%20in%20Foreign%20Policy.pdf>

diperlukan dan sangat penting, dan kedua yaitu fleksibel serta ditentukan oleh keadaan.³ Setiap kebijakan luar negeri yang bertindak atau beroperasi berdasarkan norma kepentingan nasional pasti memiliki beberapa referensi terhadap entitas fisik, politik, dan budaya yang dikenal sebagai sebuah bangsa.

Feminisme adalah gagasan bahwa semua orang, terlepas dari jenis kelamin atau gender, harus memiliki kesempatan dan hak politik, ekonomi, dan budaya yang setara. Feminisme merupakan gerakan untuk mengakhiri seksisme, eksploitasi seksis, dan penindasan. Salah satu tujuan dari politik internasional feminis (FFP) adalah untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dan mempromosikan hak-hak perempuan melalui diplomasi dan hubungan internasional. Karena mengintegrasikan tujuan kesetaraan gender ke dalam kebijakan luar negeri nasional dan keamanan internasional, kebijakan luar negeri feminis memberikan cara baru dalam melihat hubungan internasional. Komponen utama FFP di antaranya adalah advokasi untuk hak-hak perempuan, yang berarti mendorong reformasi hukum dan sosial yang memungkinkan kesetaraan gender; pengambilan keputusan yang inklusif, yang memastikan bahwa perempuan terlibat dalam proses keamanan, serta pemberdayaan ekonomi. Tiga kerangka kerja utama di tingkat internasional mendukung dan mendorong FFP, yaitu Konvensi CEDAW 1979, menetapkan penghapusan kekerasan berbasis gender sebagai cara untuk menjamin hak-hak perempuan dalam hal seksual, reproduksi, politik, ekonomi, dan sosial. Selain

³ Hans J. Morgenthau, "Another "Great Debate": The National Interest of The United States", University of Chicago, American Political Science Association, 2015

itu, Resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB tentang Women, Peace, and Security (WPS) tahun 2000 menetapkan bahwa perempuan harus terlibat lebih aktif dalam resolusi konflik dan negosiasi perdamaian sebagai cara untuk meningkatkan perwakilan mereka di parlemen.⁴ Kemudian, FFP hadir dengan menerapkan standar internasional dalam hubungan antarnegara.

FFP bersifat pragmatis, meskipun menggunakan istilah "feminist", yang secara historis dikaitkan dengan aktivis dan gerakan politik, FFP tidak hanya mengikuti agenda aktivis, namun juga bertujuan untuk memperbaiki kondisi perempuan di seluruh dunia dalam sistem patriarki yang berorientasi pertumbuhan saat ini.⁵ FFP pertama kali muncul di Swedia pada tahun 2014, dan Prancis menyatakan keinginan mereka untuk mengambil bagian dalam FFP pada tahun 2018. Di antara negara-negara di dunia yang menganut sistem kebijakan luar negeri feminis, Prancis muncul sebagai salah satu negara yang memiliki peran penting dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender di arena internasional. Dengan pendanaan yang besar, kekuatan global yang kuat, integrasi dalam perdagangan dan keamanan, membuat Prancis lebih komprehensif dan strategis dalam menerapkan kebijakan feminis di luar negeri daripada negara lain. Prancis telah mengadopsi berbagai kebijakan luar negeri yang bertujuan untuk

⁴ Ekatherina Zhukova, Malena Rosén Sundström, Ole Elgström, "Feminist foreign policies (FFPs) as strategic narratives: Norm translation in Sweden, Canada, France, and Mexico", (Department of Political Science, Lund University, Lund, Sweden, 28 July 2021), 197.

⁵ Ekatherina Zhukova, Malena Rosén Sundström, Ole Elgström, "Feminist foreign policies (FFPs) as strategic narratives: Norm translation in Sweden, Canada, France, and Mexico", (Department of Political Science, Lund University, Lund, Sweden, 28 July 2021)

mempromosikan kesetaraan gender di tingkat global. Prancis mendukung kesetaraan gender di berbagai forum multilateral, seperti PBB, Uni Eropa, dan organisasi internasional lainnya. Prancis memimpin inisiatif Forum Kesetaraan Gender Perempuan PBB yang terbesar dalam waktu 25 tahun terakhir di musim semi dan musim panas 2021, yang menghasilkan komitmen keuangan dan kebijakan besar dari negara-negara lain.⁶

Prancis juga berpartisipasi dalam inisiatif global untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, salah satu contohnya seperti Kampanye *HeForShe*. Komitmen Prancis untuk mencapai emansipasi atau kesetaraan gender terbukti sukses dengan penghapusan dominasi monarki dan pembentukan sistem pemerintahan yang lebih demokratis, khususnya termasuk penyelesaian konstitusi baru yang menjamin hak-hak universal dan individu.⁷ Presiden Emmanuel Macron telah menjadikan kesetaraan gender sebagai prioritas kebijakannya dan memulai FFP dengan empat pilar utama: mengakhiri kekerasan berbasis gender, menjamin pendidikan dan kesehatan yang adil dan berkualitas, mempromosikan pemberdayaan ekonomi, dan menjamin keadilan penuh antara perempuan dan laki-laki dalam kebijakan publik⁸

⁶ Jennifer Thomson, "Gender norms, global hierarchies and the evolution of feminist foreign policy", (University of Bath, UK, 24 January 2022), 175.

⁷ Hallie Grace Haines, "Modernizing the Marianne: The French Feminist Movement and its Effects on Gender Equality", University of Mississippi. Sally McDonnell Barksdale Honors College, 2015

⁸ Jean-Yves Le Drian and Marlène Schiappa (op-ed), 'Feminist foreign policy', France Diplomatie (8 March 2019), <https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/feminist-diplomacy/news/article/feminist-foreign-policy-op-ed-by-jean-yves-le-drian-and-marlene-schiappa-08-03>.

Pemerintah Prancis menerapkan kebijakan luar negeri feminis (FFP) dengan tujuan untuk menjadikan FFP sebagai "suara terkuat untuk kesetaraan gender dan pemenuhan hak asasi manusia bagi semua perempuan dan anak perempuan". Program FFP ini disebut sebagai "reorientasi normatif kebijakan luar negeri asing".⁹ Norma- norma yang mendasari setiap FFP telah ditetapkan dalam konvensi internasional yang bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan, meningkatkan partisipasi perempuan dalam kehidupan publik, dan memberdayakan perempuan secara ekonomi.

Pemerintah Prancis juga menekankan pernyataan bersama tahun 2020 dengan negara-negara yang berpikiran sama untuk mempertimbangkan masalah gender dan *Sexual and Reproductive Health and Right* (SRHR) sebagai tanggapan atas tindakan eksternal Prancis, seperti evaluasi strategi MoFA oleh Dewan Tinggi untuk Keadilan Gender dan G7 2019 dan hasilnya tentang kesetaraan gender, dan lain-lain. Komitmen historis Prancis terhadap demokrasi dan hak asasi manusia merupakan bagian penting dari identitas nasional Prancis dan merupakan fondasi strategis untuk menjaga kemerdekaan negara serta meningkatkan solidaritas regional dan internasional.

1.2 Rumusan Masalah

Kesetaraan gender adalah prinsip dasar hak asasi manusia.

⁹ Ekatherina Zhukova , Malena Rosén Sundström and Ole Elgström, "Feminist foreign policies (FFPs) as strategic narratives: Norm translation in Sweden, Canada, France, and Mexico", Department of Political Science, Lund University, Lund, Sweden, 2021.

Ketidaksetaraan gender dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.¹⁰ Upaya diplomasi atau kebijakan luar negeri feminisme yang dilakukan oleh Prancis mencerminkan komitmen negara terhadap isu-isu kesejahteraan dan hak asasi manusia, serta merangsang diskusi, kerja sama, dan pertukaran ide di seluruh dunia untuk mencapai tujuan kesetaraan gender secara lebih efisien. Selain mempromosikan kesetaraan gender secara normatif, kebijakan ini memiliki konsekuensi strategis bagi kepentingan Prancis secara keseluruhan, seperti dampak geopolitik, keamanan internasional, dan ekonomi.

Meskipun Prancis telah melakukan advokasi di berbagai forum internasional terkait kebijakan luar feminis, di mana kebijakan ini tentu saja dipengaruhi oleh kepentingan nasional Prancis sendiri, maka dari itu disini peneliti ingin mengkaji secara menyeluruh, terkait seberapa efektif dan relevan kebijakan ini berkontribusi untuk mencapai kepentingan nasional dan juga sebaliknya, serta seberapa efektif kebijakan ini dalam meningkatkan pengaruh Prancis di tingkat global, dan apakah FFP Prancis selaras dengan kebijakan domestiknya terkait kesetaraan gender.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada rumusan masalah diatas,

¹⁰ Jammille Bigio and Rachel Vogelstein, "Understanding Gender Equality in Foreign Policy What the United States Can Do", June 2020, <https://cdn.cfr.org/sites/default/files/pdf/Understanding%20Gender%20Equality%20in%20Foreign%20Policy.pdf>

maka muncullah pertanyaan yang dapat diteliti adalah “Apa kepentingan nasional Prancis dalam menerapkan kebijakan luar negeri feminis?”

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan apa kepentingan nasional Prancis dalam menerapkan kebijakan luar negeri feminisnya. Apakah itu terkait kepentingan keamanan, kepentingan ekonomi, dan kepentingan komunitas. Di mana setiap aspek kepentingan memiliki indikatornya masing-masing, yang pertama yaitu, indikator dari kepentingan keamanan ialah aliansi, kapabilitas nasional, dan nuklir. Selanjutnya, indikator dari kepentingan ekonomi ialah perdagangan, keterbukaan, dan *Foreign Direct Investment* (FDI). Kemudian, indikator dari kepentingan komunitas ialah demokrasi, pembangunan, dan *Intergovernmental Organization* (IGO).¹¹

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memahami hubungan antara kebijakan luar negeri feminis Prancis (FFP) dan kepentingan nasionalnya. Manfaat penelitian ini dapat dikategorikan menjadi manfaat teoretis dan manfaat praktis:

1.2.1 Secara akademis, Diharapkan penelitian ini nantinya dapat

¹¹ Charles Chong-Han Wu, “Understanding the Structures and Contents of National Interests: An Analysis of Structural Equation Modeling,” *The Korean Journal of International Studies* 15, no. 3 (2017): 391-420.

dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan studi Hubungan Internasional bagi mahasiswa, terutama bagi mahasiswa Hubungan Internasional khususnya dalam konteks terkait apakah kepentingan nasional Prancis dalam menerapkan kebijakan luar negeri feminis.

1.2.2 Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi mahasiswa serta pembaca agar lebih memahami terkait apa kepentingan nasional Prancis dalam menerapkan kebijakan luar negeri feminis.

1.6 Studi Pustaka

Dalam melakukan penelitian untuk memecahkan pertanyaan dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk mengumpulkan sebanyak mungkin data yang berguna dan layak digunakan sebagai bahan studi perpustakaan. Data-data ini berguna bagi peneliti sebagai dasar untuk memahami kejadian dan kesulitan yang timbul selama penelitian ini. Di mana peneliti telah membuat daftar makalah ilmiah yang peneliti gunakan dengan tujuan untuk memecahkan pertanyaan dalam penelitian ini. Adapun beberapa karya ilmiah yang peneliti jadikan sebagai rujukan, ialah sebagai berikut.

Tulisan pertama, merujuk pada artikel jurnal yang berjudul "*Feminist Foreign Policies (FFPS) as Strategic Narratives: Norm translation in*

Sweden, Canada, France, and Mexico” yang ditulis oleh Ekatherina Zhukova, Malena Rosén Sundström and Ole Elgström yang dipublikasikan pada tahun 2021.¹² Artikel ini membahas tentang bagaimana negara menafsirkan norma internasional ke keuntungan mereka sendiri dengan menghasilkan narasi strategis untuk memajukan ambisi *soft power* mereka di luar negeri. Menggunakan contoh kebijakan luar negeri feminis (FFP), artikel ini membandingkan Swedia, Kanada, Prancis, dan Meksiko dalam upaya mereka untuk menafsirkan norma feminis internasional ke dalam narasi strategis negara mereka. Perbandingan ini didasarkan pada tiga jenis narasi strategis, yakni pertanyaan, narasi sistem nasional dan internasional, serta dua jenis feminisme, yaitu feminisme liberal, dan feminisme intersectional.

Artikel ini membantu peneliti dalam menjawab anomali dalam penelitian ini, di mana dari artikel ini dapat memberikan data atau laporan yang menunjukkan bahwa Swedia dan Meksiko lebih memprioritaskan kebijakan sosial, sementara Prancis dan Kanada menekankan peran pasar dalam mengatasi ketidaksetaraan gender. Narasi sistem internasional menunjukkan bahwa Swedia dan Meksiko melihat tantangan global sebagai penggerak ketidaksetaraan gender, sementara Prancis dan Kanada melihat ketidakseimbangan gender sebagai penyebab masalah global. Artikel ini juga menunjukkan bahwa Swedia dan Meksiko mengacu pada negara-negara FFP lainnya untuk “mendukung” inisiatif feminis mereka, sementara Prancis dan

¹² Ekatherina Zhukova, Malena Rosén Sundström, Ole Elgström, “Feminist foreign policies (FFPs) as strategic narratives: Norm translation in Sweden, Canada, France, and Mexico”,(Department of Political Science, Lund University, Lund, Sweden, 28 July 2021)

Kanada tidak berhubungan dengan negara lain.¹³

Artikel jurnal yang kedua yang peneliti jadikan rujukan adalah artikel jurnal yang berjudul “*Nation Branding and Feminist Diplomacy After Crisis: France’s Response to SEA Allegations in Central African Republic*” yang ditulis oleh Georgina Holmes dan Sabrina White yang dipublikasikan pada tahun 2023.¹⁴ Artikel ini menunjukkan bahwa analisis gender dan ras dari interaksi konstitutif antara branding bangsa dan diplomasi memajukan pemahaman tentang bagaimana negara-negara liberal menggunakan kebijakan feminis dalam menanggapi krisis politik. Mengadopsi pendekatan post-kolonial feminis dan mengacu pada analisis diskursus pidato diplomatik Prancis yang dilakukan di Dewan Keamanan antara PBB Juli 2011 dan Januari 2020, artikel ini mengeksplorasi bagaimana diplomat laki-laki dan perempuan menangani kegagalan tanggung jawab Prancis ketika pejuang perdamaian Prancis melecehkan anak-anak secara seksual di Republik Afrika Tengah pada 2014 – 2015, yang dikenal sebagai krisis eksploitasi dan pelecehan seksual, atau krisis SEA.¹⁵ Artikel ini juga menjelaskan bagaimana diplomat menggunakan strategi afektif dan performatif untuk maju melalui

¹³ Ekatherina Zhukova, Malena Rosén Sundström, Ole Elgström, “Feminist foreign policies (FFPs) as strategic narratives: Norm translation in Sweden, Canada, France, and Mexico”, (Department of Political Science, Lund University, Lund, Sweden, 28 July 2021)

¹⁴ Georgina Holmes, Sabrina White, “Nation branding and feminist diplomacy after crisis: France’s response to SEA allegations in Central African Republic”, (Department of Politics and International Studies, The Open University, UK and School of Politics and International Studies, University of Leeds, Leeds, UK, 2023)

¹⁵ Georgina Holmes, Sabrina White, “Nation branding and feminist diplomacy after crisis: France’s response to SEA allegations in Central African Republic”, (Department of Politics and International Studies, The Open University, UK and School of Politics and International Studies, University of Leeds, Leeds, UK, 2023)

siklus hidup krisis politik dengan cepat dan mengembalikan keamanan ontologis Prancis.

Artikel jurnal ini membantu peneliti dalam menjawab anomali penelitian terkait apa yang mempengaruhi atau latar belakang Prancis dalam menganut kebijakan luar negeri feminis. Di mana dalam artikel jurnal ini ditegaskan bahwa sementara kebijakan luar negeri feminis dan diplomasi feminis Prancis ini berfungsi sebagai solusi jangka pendek untuk kerusakan reputasi, citra nasional jangka panjang Prancis. Namun, dalam upaya untuk mengendalikan citranya tentang krisis SEA, diplomat Prancis mengesampingkan krisis tanggung jawab globalnya terkait eksploitasi seksual, pelecehan dan membungkam krisis pribadi para korban SEA.¹⁶

Literatur selanjutnya yang menjadi rujukan bagi peneliti adalah artikel jurnal yang berjudul *“Feminism(s) and Feminist Foreign Policy(ies) The cases of France, Spain and Germany”* yang ditulis oleh Virginia Cezilly Fernandez De Liger, yang dipublikasikan pada tahun 2023.¹⁷ Artikel ini menyatakan bahwa kebijakan luar negeri feminis bukanlah fenomena yang sistematis, di mana terdapat pemahaman yang berbeda di antara para ahli maupun di antara negara-negara, seperti yang ditunjukkan oleh studi kasus Prancis, Spanyol dan Jerman.

Artikel ini memberi sumbangsih dalam penelitian ini karena dalam

¹⁶ Georgina Holmes, Sabrina White, “Nation branding and feminist diplomacy after crisis: France’s response to SEA allegations in Central African Republic”, (Department of Politics and International Studies, The Open University, UK and School of Politics and International Studies, University of Leeds, Leeds, UK, 2023)

¹⁷ Virginia Cezilly Fernandez De Liger, “Feminism(s) and Feminist Foreign Policy(ies) The cases of France, Spain and Germany”, (UMEA University, 2023)

artikel ini tertuang pemahaman atau perspektif yang berbeda tentang feminisme. Negara-negara yang menganut kebijakan luar negeri feminis ini memiliki ambisi atau tujuan yang berbeda dalam transformatif gender mereka, pemahaman tentang kesetaraan gender. Berbagai perspektif feminisme dan elemen yang berkaitan dengan teori hubungan internasional sangat mempengaruhi kebijakan luar negeri feminis Prancis, Spanyol dan Jerman.

Literatur selanjutnya, yang menjadi rujukan peneliti adalah artikel yang berjudul *“Defining Feminist Foreign Policy: A 2021 Update”* yang ditulis oleh Lyric Thompson, Spogmay Ahmed dan Tanya Khokhar, dan dipublikasikan pada tahun 2021.¹⁸ Artikel ini membahas tentang perkembangan kebijakan luar negeri feminis (FFP) di berbagai negara yang menganut kebijakan FFP ini, diantaranya seperti Swedia, Mexico, Prancis, Spanyol, dan lainnya. Dalam artikel ini terdapat perkembangan kebijakan luar negeri feminis di berbagai negara yang menganut kebijakan ini dimulai dari awal inisiasi hingga kebijakan berlangsung pada 2021, di mana dalam artikel ini setiap negara dibahas secara eksplisit satu-persatu.

Artikel ini membantu penulis dalam melihat bagaimana awal inisiasi Prancis terkait kebijakan luar negeri feminis ini, serta bagaimana perkembangan kebijakan ini di Prancis sampai tahun 2021. Artikel ini menyatakan bahwa implikasi dari perubahan kebijakan luar negeri Prancis menjadi kebijakan luar negeri feminis, tanpa mengubah kebijakan atau praktik

¹⁸ Lyric Thompson, Spogmay Ahmed , Tanya Khokhar, *“Defining Feminist Foreign Policy: A 2021 Update”*, (International Center for Research on Woman, 2021)

politik, dianggap masih tidak jelas dan layak diperdebatkan lebih lanjut. Namun, pada Komisi 65 tentang Status Perempuan (CSW) pada bulan Maret 2021, Prancis mengumumkan niatnya untuk mengembangkan buku panduan yang menggambarkan pedoman dan prinsip-prinsip FFP-nya, yang akan memperjelas tujuan, dan pendekatan kebijakan luar negerinya.

Sedangkan untuk Strategi Internasional tentang Kesetaraan Gender yang pertama kali dipromosikan pada tahun 2007, yang berisikan sejumlah prioritas terkait gender bagi pemerintah Prancis untuk menangani melalui bantuan luar negeri. Berdasarkan strategi internasional menurut Badan Direktorat Jenderal Hubungan Internasional dan Strategi (DGIS) di Prancis yang bertugas menangani urusan hubungan internasional dan keamanan negara, menyatakan bahwa, “kesetaraan gender adalah prioritas utama dari mandat presiden. Ini akan menjadi prinsip dan tema lintas batas, dan akan mendasari semua tindakan eksternal Prancis serta langkah-langkah spesifik yang akan diambil untuk mempromosikannya.”¹⁹

Literatur terakhir yang menjadi rujukan bagi peneliti adalah artikel jurnal yang berjudul “*Gender norms, global hierarchies and the evolution of feminist foreign policy*” yang ditulis oleh Jennifer Thomson, dan dipublikasikan pada tahun 2022.²⁰ Artikel ini menyatakan bahwa kesetaraan gender telah lama diadopsi oleh negara-negara untuk menunjukkan nilai-nilai

¹⁹ Lyric Thompson, Spogmay Ahmed , Tanya Khokhar, “Defining Feminist Foreign Policy: A 2021 Update”, (International Center for Research on Women, 2021)

²⁰ Jennifer Thomson, ““Gender norms, global hierarchies and the evolution of feminist foreign policy”, (European Conference on Politics and Gender and Bristol University Press,2022)

liberal dan menghormati norma-norma internasional. Perspektif feminis berpendapat bahwa hierarki gender yang diciptakan oleh norma-norma ini digunakan untuk mendukung dan mempertahankan hubungan internasional.

Artikel ini berkontribusi pada penelitian ini karena berisikan literatur tentang norma dan hierarki gender melalui studi kasus kebijakan luar negeri feminis. Artikel ini membahas empat negara yang mengadopsi kebijakan luar negeri feminis, yaitu Swedia, Kanada, Prancis dan Meksiko. Artikel ini berpendapat bahwa norma yang berkembang dari kebijakan eksternal feminis bertindak untuk menandakan modernitas liberal dan kepatuhan terhadap tatanan liberal internasional ketika digunakan oleh negara-negara. Serta penyebaran kebijakan luar negeri feminis ini berkontribusi pada hierarki gender global yang ada dan posisi negara-negara ini di kancah internasional.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Teori Kepentingan Nasional

Keputusan dan kebijakan luar negeri masing-masing negara dibangun atau dibuat berdasarkan dengan konsep kepentingan nasional. Kepentingan nasional umumnya digunakan dalam dua cara: yang pertama yaitu untuk menggambarkan, mendukung, atau mengkritik kebijakan luar negeri, dan yang kedua yaitu sebagai alat analitis untuk menilai dan menjelaskan tindakan luar negeri negara. Kepentingan nasional yang mendorong kebijakan luar negeri suatu negara akan selalu

menghasilkan upaya untuk mendapatkan kekuasaan atau otoritas. Istilah kepentingan nasional mengacu pada cita-cita atau tujuan yang diprioritaskan oleh suatu negara, seperti kebebasan, kemerdekaan, dan keamanan.

Kepentingan nasional ini biasanya diartikan dalam hal kelangsungan hidup fisik, kemakmuran ekonomi, dan kedaulatan politik. Konsep kepentingan nasional digunakan dalam perdebatan politik untuk mendukung atau menentang, serta mendasari suatu kebijakan.²¹ Konsep kepentingan nasional terdiri dari dua komponen, yaitu, karena adanya tuntutan rasional atau keadaan, dan yang kedua karena adanya perubahan atau tergantung pada situasi.²²

Kepentingan nasional tidak dapat dipisahkan dengan gagasan *self-determination*, yang didefinisikan sebagai hak kelompok-kelompok nasional untuk diatur bersama dan membentuk komunitas politik independen, atau kedaulatan akan berada di tangan negara. Hubungan internasional tidak lagi dikendalikan oleh kepentingan pribadi, ambisi, dan emosi pemimpin, tetapi oleh ambisi dan kepentingan kolektif bangsa.²³ Dalam mengembangkan kebijakan berdasarkan kepentingan nasional, negara akan melakukan berbagai hal, baik melalui konflik atau kerjasama. Kepentingan nasional tidak ditentukan oleh pandangan

²¹ Michael G. Roskin, "National Interest:: From Abstraction to Strategy", (Strategic Studies Institute, US Army War College, 1994)

²² Hans J. Morgenthau, "The Mainsprings of American Foreign Policy: The National Interest vs. Moral Abstractions", (The American Political Science Review, XLIV, December, 1950),

²³ Carr, (1945, 8)

seseorang atau kehadiran partai, sebaliknya, sebuah negara harus menggunakan kemampuan rasionalnya untuk menetapkan kebijakan luar negeri.

Hans J. Morgenthau mendefinisikan kepentingan nasional sebagai kemampuan minimum suatu negara untuk mempertahankan, melestarikan, dan melindungi identitas politik, fisik, dan budaya dari ancaman eksternal.²⁴ Konsep kepentingan nasional ini digunakan untuk melihat apakah kepentingan nasional Prancis yang melatarbelakangi Prancis menganut kebijakan luar negeri feminis.

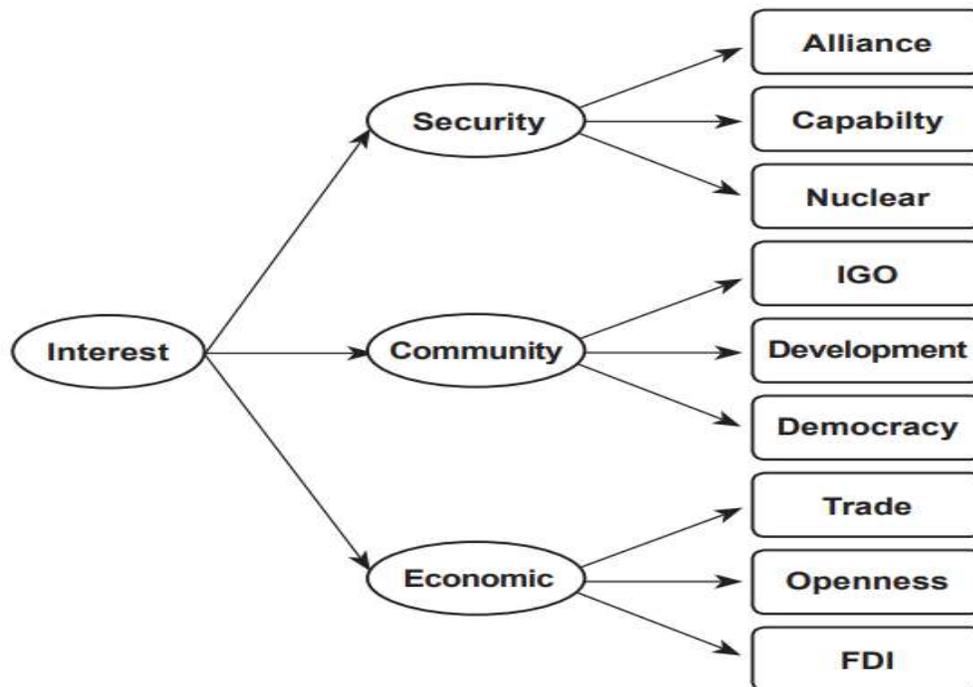
Charles Chong-Han Wu berpendapat bahwa konsep kepentingan nasional akan sulit dipahami jika kita hanya mengaplikasikan satu indikator untuk menganalisis kepentingan suatu negara seperti yang dilakukan oleh para ahli hubungan internasional. Wu setuju dengan pernyataan Joseph Nye yang menyatakan bahwa pengertian kepentingan nasional merupakan "*slippery concept*" yang memerlukan analisis yang lebih multidimensional.²⁵ Kepentingan nasional suatu negara tidak hanya berfokus atau bertujuan pada pencapaian kekuasaan atau keamanan semata seperti yang diyakini perspektif realis, tetapi juga mencakup kepentingan perekonomian negara, dan juga kepentingan ketiga yang disebut kepentingan komunitas.

Charles Chong-Han Wu mengemukakan suatu kerangka konsep

²⁴ Hans J. Morgenthau, "The Primacy of the National Interest", (The Phi Beta Kappa Society, 1932)

²⁵ Joseph S. Nye, "Redefining National Interest," *Foreign Affairs* 78, no. 4 (Juli/Agustus 1999): 22-35.

pemikiran terkait aspek dalam kepentingan nasional sebuah negara, di mana Wu menyajikan kerangka pemikiran kepentingan nasional yang lebih terstruktur, dengan membaginya kedalam tiga pemikiran aspek penting, yaitu kepentingan keamanan, kepentingan ekonomi, dan kepentingan komunitas. Di mana setiap aspek kepentingan memiliki indikatornya masing-masing. Pertama, indikator dari kepentingan keamanan ialah aliansi, kapabilitas nasional, dan nuklir. Selanjutnya, indikator dari kepentingan ekonomi ialah perdagangan, keterbukaan, dan *Foreign Direct Investment* (FDI). Kemudian, indikator dari kepentingan komunitas ialah demokrasi, pembangunan, dan *Intergovernmental Organization* (IGO).²⁶



²⁶ Charles Chong-Han Wu, "Understanding the Structures and Contents of National Interests: An Analysis of Structural Equation Modeling," *The Korean Journal of International Studies* 15, no. 3 (2017): 391-420.

Bagan 1.1: Model Konfirmatori Faktor Kepentingan Nasional

Sumber: Charles Chong-Han Wu, 2017

Berikut penjelasan atau penjabaran terkait masing-masing aspek utama kepentingan nasional beserta indikator-indikatornya berdasarkan model kepentingan nasional menurut Charles Chong-Han Wu.

1. Kepentingan Keamanan (*Security Interest*)

Keamanan didefinisikan sebagai tindakan yang harus diambil oleh negara untuk menjamin keberlangsungan hidupnya. Suatu negara dapat menunjukkan kepentingan keamanannya dengan berbagai tanda-tanda informasi, yang pada dasarnya merupakan tindakan negara tersebut. Untuk mencapai kepentingan keamanan, negara akan lebih mengutamakan untuk membangun aliansi kekuatan serta upaya untuk memperoleh dan mengembangkan senjata.

1) Aliansi (*Alliances*)

Secara umum, aliansi adalah perjanjian formal antara dua pihak atau lebih untuk berkolaborasi atau bermitra dalam mengejar tujuan yang sama. Namun, aliansi militer yang dibentuk oleh negara-negara untuk mencapai tujuan keamanan tertentu adalah fokus utama analisis studi ini tentang aliansi sebagai penanda kepentingan keamanan.

Dalam konteks ini, aliansi mencakup baik aliansi ofensif maupun defensif. Keputusan untuk membentuk aliansi

adalah pilihan berdaulat yang didasarkan pada kepentingan negara, yaitu menggabungkan tujuan politik dengan kemampuan militer. Ini adalah salah satu rasionalitas strategis.

2) Kapabilitas Nasional (*National Capabilities*)

Kapabilitas nasional, sebagai indikator kepentingan keamanan nasional, merujuk pada *hard power* atau militer suatu negara. Wu menganjurkan penggunaan Indeks Komposit Kapasitas Nasional (CINC) untuk menilai sumber daya suatu negara untuk pertempuran. Statistik ini menggunakan banyak variabel untuk menentukan apakah suatu negara memiliki sumber daya untuk mendukung dominasinya di panggung global, dengan memanfaatkan persentase rata-rata dari total dunia dalam enam komponen yang mewakili kekuatan demografis, ekonomi, dan militer.

3) Kepemilikan Senjata Nuklir (*Nuclear Weapons Possession*)

Kepemilikan senjata nuklir dapat diartikan sebagai salah satu indikator dimensi kepentingan keamanan suatu negara, mengingat dampaknya pada berbagai aspek keamanan nasional, seperti stabilitas strategis, pertahanan nasional, pengaruh diplomatik, jaminan keamanan,

pengecehan tindakan koersif, dan bahkan prestise serta identitas nasional. Secara keseluruhan, kepemilikan senjata nuklir adalah komponen kompleks dalam tujuan keamanan suatu negara, mempengaruhi perhitungan strategis, hubungan diplomatik, dan persepsi keamanan baik di dalam negeri maupun secara global.

2. Kepentingan Ekonomi (*Economic Interest*)

Wu menganggap kekhawatiran ekonomi sebagai fitur penting dalam konsep kepentingan nasional, terinspirasi oleh ideologi liberal, yang berpendapat bahwa sebuah negara peduli dengan kepentingan keamanan dan ekonomi. Menurut Charles Lipson, tantangan ekonomi lebih mungkin memicu kolaborasi internasional daripada masalah keamanan.²⁷

Secara umum, kepentingan ekonomi berkaitan dengan komponen-komponen yang ditekankan oleh ekonom politik sebagai hal yang krusial untuk pemeliharaan tatanan global.

Negara-negara dengan kepentingan ekonomi yang lebih tinggi dapat mendukung perdagangan bebas, pasar terbuka, dan *Foreign Direct Investment* (FDI).

1) Perdagangan Internasional (*International Trade*)

²⁷ Charles Lipson, "International Cooperation in Economic and Security Affairs," *World Politics* 37, no. 1 (October 1984): 1–23, <https://doi.org/10.2307/2010304>.

Perdagangan internasional adalah pertukaran komoditas dan layanan antara negara-negara melintasi batas-batas nasional, serta pembelian dan penjualan produk di pasar internasional.

Perdagangan internasional adalah indikator kepentingan ekonomi suatu negara karena memfasilitasi akses ke pasar, sumber daya, dan teknologi, mendorong pertumbuhan ekonomi, spesialisasi, dan diversifikasi, menarik investasi asing, serta mendorong hubungan diplomatik melalui ketergantungan ekonomi.

2) Keterbukaan Pasar (*Market Openness*)

Tingkat keterbukaan pasar adalah ukuran dari kepentingan ekonomi suatu negara karena menunjukkan kesiapan negara tersebut untuk terlibat dalam perdagangan internasional, investasi asing, dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui akses pasar dan persaingan global.

3) Investasi Asing Langsung (*Foreign Direct Investment*)

Investasi langsung asing (FDI) mengacu pada investasi oleh entitas asing dalam bisnis atau aset suatu negara. FDI adalah ukuran keberhasilan ekonomi suatu negara karena menunjukkan daya tarik yang ingin ditonjolkan negara tersebut kepada investor asing, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

3. Kepentingan Komunitas (*Community Interest*)

Negara-negara yang tergabung dalam organisasi yang sama atau memiliki kesamaan ideologis lebih mungkin untuk menciptakan kepentingan yang serupa. Kebutuhan untuk memupuk nilai-nilai dan identitas yang sama, negara-negara dengan kesamaan ideologis atau institusional akan memiliki tujuan kebijakan yang sebanding. Akibatnya, komponen kepentingan komunitas memiliki kekuatan penjas yang luar biasa dalam bagaimana negara membuat keputusan kebijakan luar negeri.

1) Organisasi Antarnegara (*Intergovernmental Organization/IGO*)

Indikator ini merujuk pada keanggotaan negara dalam organisasi internasional. Negara-negara yang tergabung dalam organisasi antar pemerintah atau aliansi lebih mungkin untuk berbagi kepentingan komunitas yang sama karena tujuan, nilai, norma, interaksi reguler, kerangka kerja institusional, manfaat timbal balik, dan upaya kolaboratif untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas regional atau aliansi.

2) Pembangunan (*Development*)

Kehadiran dan efektivitas proses berbasis pasar dalam suatu negara dapat berfungsi sebagai indikator pembangunan. Indikator pembangunan domestik dapat mencakup institusi pasar, liberalisasi ekonomi, integrasi global, pengembangan

sumber daya manusia, dan infrastruktur. Elemen-elemen ini bekerja sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kekayaan, dan kesejahteraan sosial dalam suatu negara. Negara-negara dengan komitmen dan kriteria pembangunan yang serupa lebih mungkin untuk mengambil keputusan yang sama guna mencapai tujuan bersama.

3) Demokrasi (*Democracy*)

Tingkat demokrasi atau jenis rezim suatu negara juga dapat digunakan untuk menilai pemenuhan kepentingan masyarakat. Pemerintahan demokratis cenderung menyelaraskan aktivitas mereka dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas dengan mematuhi norma-norma demokratis dalam urusan internal maupun internasional.

Dengan konsep kepentingan nasional menurut Charles Chong-Han Wu ini diharapkan dapat membantu peneliti dalam menemukan atau menganalisa terkait kepentingan nasional dari negara Prancis.

1.8 Metodologi Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, riset kualitatif cenderung berpusat pada penelitian secara menyeluruh sejumlah contoh

atau tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan meluas.²⁸ Penelitian ilmu sosial yang dikenal sebagai metode kualitatif ini, merupakan metode mengumpulkan dan bekerja dengan data non-numerik dengan tujuan menafsirkan makna data tersebut. Metode ini membantu peneliti untuk memahami terkait topik yang akan diteliti.²⁹ Penelitian kualitatif menganalisis peristiwa dan fenomena sosial, di mana hasil dari penelitian kualitatif biasanya dijabarkan melalui analisis data yang relevan, yang dikenal sebagai analisis deskriptif.

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, di mana dalam penelitian ini akan dilakukan analisis terkait topik yang akan dikaji. Pemilihan jenis penelitian kualitatif didasarkan pada metode yang akan memberikan lebih banyak detail untuk menjawab masalah penelitian. Metode ini termasuk data sekunder seperti narasi dari wawancara dan pengamatan data-data lainnya.³⁰ Selain itu, peneliti mengambil jenis penelitian ini karena hasilnya dari penelitian ini nantinya akan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif, yang akan menggambarkan sekaligus menjelaskan fenomena, gejala, peristiwa, atau kejadian saat ini. Tujuannya adalah agar peneliti dalam penelitian ini dapat menggambarkan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi saat ini, sehingga peneliti dapat menjelaskan bagaimana

²⁸ Lisa Harisson, *Metode Penelitian Politik*, (Jakarta: Kencana, 2016)

²⁹ S. Aminah, Roikan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*, (Jakarta: Prenada Group, 2019)

³⁰ Mohtar Mas'ood, "Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi", (Penerbit PT Pustaka LP3ES, 1994).

kepentingan nasional Prancis mempengaruhi kebijakan luar negeri feminis Prancis.

1.8.2 Batasan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada kebijakan luar negeri feminis Prancis, serta bagaimana kepentingan nasional Prancis mempengaruhi kebijakan luar negeri feminisnya. Terkait penelitian ini, peneliti menetapkan batasan penelitian pada rentang tahun 2018 hingga 2024. Alasan ditetapkannya dari tahun 2018, karena awal mula inisiasi Prancis untuk menganut kebijakan luar negeri feminis dimulai pada tahun 2018 yang kemudian berlangsung hingga saat sekarang, maka dari itu peneliti menetapkan tahun 2024, sebagai tahun akhir penelitian ini.

1.8.3 Unit dan Level Analisis

Unit analisis adalah objek atau entitas yang diteliti dalam penelitian ini. Dalam konteks analisis kebijakan luar negeri feminis Prancis, unit analisisnya adalah kebijakan luar negeri feminis Prancis, seperti dokumen kebijakan resmi, strategi kebijakan luar negeri feminis, dan inisiatif serta program yang dibuat oleh Kementerian Luar Negeri Prancis terkait kebijakan luar negeri feminis. Level analisis mengacu pada tingkat di mana fenomena yang diteliti dianalisis. Dalam penelitian ini, level analisisnya adalah negara Prancis.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder atau studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data sekunder adalah cara-cara praktis yang ditempuh peneliti dalam mencari dan mengumpulkan data penelitian dalam bentuk ide/gagasan, kata-kata, tindakan, peristiwa/kasus, tulisan-tulisan, gambar, dan lain-lain, yang sesuai dengan masalah atau fokus penelitian.³¹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik penelusuran kepustakaan atau dokumentasi. Teknik kepustakaan digunakan dengan cara mengumpulkan teori, berita, pendapat, komentar, dan juga penelitian serupa, terkait kebijakan luar negeri feminis dan juga kepentingan nasional Prancis, yang peneliti peroleh dari beberapa artikel jurnal yang diantaranya sudah peneliti jabarkan ddalam studi pustaka.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sekumpulan teknik yang digunakan untuk memproses dan menampilkan data untuk menemukan jawaban dan kesimpulan atas pertanyaan penelitian. Tahap pertama adalah mengumpulkan data yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Selanjutnya, data tersebut dikategorikan berdasarkan teori yang digunakan. Dari data yang telah ditemukan, peneliti akan mengolah dan membagi data tersebut untuk menjawab pertanyaan penelitian. Setelah itu, peneliti akan menafsirkan atau

³¹ Saddat Nasurtion, "Metode Research (Penelitian Ilmiah)", (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)

menjelaskan data yang ditemukan menggunakan teori kepentingan nasional.

Berdasarkan pertanyaan penelitian, yaitu apa kepentingan nasional Prancis dalam kebijakan luar negeri feminisnya, maka diperlukan analisis terkait apa kepentingan nasional dari negara Prancis, terutama dalam kebijakan luar negeri feminisnya menggunakan teori konsep kepentingan nasional. Teori konsep kepentingan nasional adalah alat strategis yang dapat digunakan untuk dapat menjabarkan terkait kepentingan nasional di berbagai bidang. Penelitian ini menggunakan teori kepentingan nasional menurut Charles Chong-Han Wu, di mana dari konsep ini akan menjabarkan apa sebenarnya kepentingan nasional dari negara Prancis dalam kebijakan luar negeri feminisnya, Wu menyajikan kerangka pemikiran kepentingan nasional yang lebih terstruktur, dengan membaginya kedalam tiga pemikiran aspek penting, yaitu kepentingan keamanan, kepentingan ekonomi, dan kepentingan komunitas. Dari ketiga kerangka pemikiran inilah penulis akan menjabarkan kepentingan nasional Prancis dan menjawab pertanyaan penelitian.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab I dari penelitian ini memberikan pengenalan tentang penelitian yang akan dilakukan. Dalam bab ini, peneliti menjelaskan latar belakang masalah untuk menjelaskan fenomena dan masalah yang terjadi. Selanjutnya, peneliti mencantumkan rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, serta

manfaat teoritis dan praktis dari penelitian. Dalam bab ini peneliti juga menjelaskan metodologi penelitian, termasuk jenis penelitian, batasan penelitian, unit dan tingkat analisis, dan kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, bagian sistematika penulisan dari bab ini mencakup penjelasan lengkap tentang penelitian, sehingga pembaca dapat memahami awal mula atau latar belakang masalah yang diteliti.

BAB II Sejarah Perkembangan Prancis

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan terkait kebijakan luar negeri Prancis. Peneliti akan menjabarkan dan menjelaskan secara rinci terkait dengan sejarah Prancis, bagaimana perkembangan kebijakan luar negeri Prancis hingga bagaimana akhirnya berubah menjadi kebijakan luar negeri feminis.

BAB III KEBIJAKAN LUAR NEGERI PRANCIS PERIODE 2019 – 2030

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan aktor utama dalam penelitian ini, yaitu kebijakan luar negeri feminis. Peneliti akan menjabarkan sejarah awal munculnya feminis, dan bagaimana perkembangan kebijakan feminis, hingga bagaimana negara-negara menganut kebijakan luar negeri feminis, terutama negara Prancis. Dari penjabaran tersebut diharapkan dapat menjelaskan secara rinci kepada pembaca bagaimana kebijakan luar negeri feminis Prancis.

BAB IV Analisis Kepentingan Nasional Prancis dalam Kebijakan Luar Negeri Feminisnya

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan unit analisis dari penelitian ini, yaitu kepentingan nasional Prancis dalam kebijakan luar negerinya. Peneliti akan menganalisis kepentingan nasional Prancis ini dengan menggunakan konsep kepentingan nasional. Dengan begitu, pada bab ini akan dapat dilihat apa kepentingan nasional Prancis dalam kebijakan luar negeri feminisnya.

BAB V Penutup

Bab V akan menjadi bagian terakhir dari penelitian, di mana pada bab ini peneliti akan menyimpulkan semua yang telah dibahas dalam bab sebelumnya. Selain itu, bab ini juga akan berisi saran dari penulis untuk peneliti lain agar lebih baik dalam melakukan penelitian selanjutnya. Bab ini juga akan mencantumkan daftar literatur yang digunakan penulis selama penyusunan penelitian ini.

